



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHUDHOIFAH, SH.,
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 720183

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.070.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA KUDUS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 7968 m² di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 5630 m² di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m²/54 m² di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 54.500.000

1. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 296.212.256**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.449.712.256



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.449.712.256

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.